

# J24022119100

*by* Fekon Uniga

---

**Submission date:** 10-Aug-2023 04:17AM (UTC+0100)

**Submission ID:** 2143780083

**File name:** Jurnal\_Skripsi\_Tantri\_Hardianti\_24022119100.docx (25.29K)

**Word count:** 2197

**Character count:** 14630

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN GARUT

Tantri Hardianti<sup>1</sup>; Dr. Muslim Al-kautsar<sup>2</sup>; Fitri Syakinah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Garut  
[24022119100@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022119100@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Garut  
[malkautsar@uniga.ac.id](mailto:malkautsar@uniga.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Garut  
[fitrisyakinah@uniga.ac.id](mailto:fitrisyakinah@uniga.ac.id)

### Abstrak

Judul esai ini adalah "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Garut". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan kode pajak periklanan mempengaruhi Badan Pendapatan Daerah Garut. Teori George Edward III adalah salah satu yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, pajak reklame merupakan salah satu bentuk iklan daerah yang memiliki potensi terbesar untuk menarik tenaga kerja berkualitas dari warga negara Indonesia yang membutuhkan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program "Pajak Reklame" di Badan Pendapatan Daerah Garut telah berjalan dengan sangat baik. Hasil tersebut antara lain: sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, karena beberapa masalah yang ada di dalam Badan Pendapatan Daerah, komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pajak Iklan

### Abstract

The study subject is titled "Implementation of Advertising Tax Collection Policy in Garut Regency." This study's objective is to ascertain how the Regional Revenue Agency of the Garut Regency has implemented its regulations for collecting advertising taxes. The George Edward III idea was employed in this investigation. In an effort to maximize local tax revenue, advertising tax is a potential source of regional income for high funding from Indonesian citizens who must pay taxes. This study employs a descriptive methodology for qualitative research. The outcomes demonstrate that the Garut Regency Regional Revenue Agency's execution of the billboard tax collection policy has gone

resources, disposition, and organizational structure all work pretty effectively. However, in terms of.

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan amanat yang harus dibayar oleh rakyat agar pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan tanpa campur tangan dari balas jasa. Pajak merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan proyek pembangunan nasional. Ini adalah sumber penerimaan bangsa. Penting untuk memahami sepenuhnya krisis biaya pembangunan untuk mencapai tujuan yang ada. Satu-satunya strategi yang paling efektif untuk mengurangi risiko keruntuhan suatu negara selama pembangunan adalah mengumpulkan sejumlah uang yang berasal dari negara tersebut dalam bentuk pajak. Pajak digunakan untuk memfasilitasi usaha bersama yang menguntungkan kedua belah pihak (Waluyo, 2017:2).

Satu-satunya sumber penerimaan pajak yang dapat diakses pemerintah kabupaten atau kota adalah iklan. Representasi sendiri merupakan bentuk komunikasi antara produsen dan konsumen untuk mempromosikan barang yang dibuat oleh satu perusahaan atau lembaga lain untuk tujuan yang sama. Pemasaran ulang di dalamnya dapat berupa papan, peragaan, dan pemasaran ulang

16

Tabel 1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame  
Kabupaten Garut Tahun 2018-2022  
(Dalam Rupiah)**

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
1	2018	3.950.000.000	4.564.004.815	614.004.815	115,54%
2	2019	4.400.000.000	4.911.049.494	511.049.494	111,61%
3	2020	4.069.412.455	3.611.963.414	-457.449.041	88,76%
4	2021	4.850.000.000	5.387.434.561	537.434.561	111,08%
5	2022	5.865.000.000	5.492.151.074	372.848.926	93,4 %

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, diolah kembali 2022)

Pada tahun 2020 penerimaan pajak reklame mengalami penurunan serta kurang dari yang ditargetkan, yakni penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 3.611.963.414 dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.069.412.455, ini dikarenakan adanya covid-19 yang menghambat penerimaan pajak reklame, tetapi dengan adanya covid-19 pihak Bapenda memberikan batas kelonggaran penanguhan di semua sektor demikian juga mengalami penurunan dan tidak sesuai harapan, terbukti dengan penerimaan yang dicapai dengan biaya Rp. 5.492.151.074 dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.865.000.000. Karena kondisi umat manusia saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pajak, yang dimulai dengan pendaftaran, penagihan, dan pengawasan pada target serta realisasi reklame pajak untuk setiap tahun anggarannya dan pencabutan reklame, perlu adanya landasan hukum dan jelas, tegas, dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pajak reklame mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemungutan sehingga tidak semua wajib pajak sadar akan pajak, tidak semua pendataan lancar tergantung orangnya, jika orang tersebut tidak bayar pajak karena tidak mendaftar, hal ini pajak memaksa harus bayar karena pemerintah telah mengeluarkan aturan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk

solusinya bahwa pemungutan pajak reklame sebanyak-banyaknya di lapangan harus dijadikan wajib pajak yang bersifat komersial harus memaksa dan memberikan pemahaman akan kesadaran wajib pajak. Pemerintah kabupaten Garut terus memberikan pembinaan dan pelayanan yang mendukung pemungutan pajak reklame.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan Minimum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah pembayaran wajib atas bantuan kepada negara yang telah dijajah oleh perorangan atau pemerintah asing sesuai dengan dengan Undang-Undang, tidak menerima bantuan tepat waktu dan tidak digunakan untuk kesejahteraan umum negara.

Menurut Mardiasmo (2019:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan hukum tidak tertulis (yang dapat diterima) dan tanpa adanya balas jasa (kontraprestasi) yang dapat dibuka dan digunakan secara perlahan. untuk membayar kebutuhan pokok.

### 2.2 Implementasi Hukum

Menurut Pramono Joko (2020), implementasi harus dilakukan dengan tetap mengingat tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan tertentu. Taktik ini dimaksudkan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi kalimat pola-pola.

### 2.3 Koleksi

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pasal 1. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan pendataan objek kena pajak, penetapan besarnya pajak atau penerimaan karena tunggakan atau pemungutan atau penerimaan pajak dan pelacakan setoran.

### 2.4 Pajak Periklanan

Menurut Peraturan Daerah Kab Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Reklame. Merupakan sebuah media penyedia jasa periklanan dan bisa disewa oleh siapa saja dengan harga atau biaya yang sudah jelas dan rinci dari awal sampai akhirnya, pelaksanaan jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca atau didengar di tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh negara. (Siahaan, 2016:381).

Penerapan Kode Pemungutan Pajak Iklan  
di Kabupaten Garut

Penerapan Kode Pajak  
Iklan

Kendala

Upaya

- 14
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

(Pramono, 2020)

Pemungutan Pajak Reklame

2  
Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dikenal dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu digunakan untuk mengilustrasikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tertentu tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih komprehensif. Data primer digunakan untuk mengetahui profil periklanan di Bapenda Garut. Data lain yang digunakan dikenal sebagai data sekunder, atau data yang proses dengan cepat. Dalam hal ini bisa berupa dinas-dinas atau lembaga pemerintah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan reklame pajak di wilayah Garut. Teknik wrangling data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut adalah metodologi analisis kualitatif.

### 4. Analisis dan Penjelasan Hasil

Inisiatif Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintah daerah sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak nerimaan. Padahal sesuatu yang baik dan signifikan sedang terjadi, namun jika tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hanya akan menghasilkan dokumen yang tidak ada. Implementasi adalah proses yang dilakukan setelah perangkat lunak dibangun; selama implementasi, perangkat lunak dibangun dengan perhatian dan kemampuan yang sama seperti saat pertama kali dibangun. Menurut kebijaksanaan konvensional, kemampuan suatu program untuk mencapai tujuannya bergantung pada seberapa baik penerapannya. Untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan, segala sesuatu yang harus dilakukan harus diputuskan atau dilakukan. Setiap proyek yang dilaksanakan pada akhirnya akan memiliki faktor atau variabel yang akan berdampak pada berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu proyek tertentu. Pendekatan implementasi kebijakan oleh George C. Edward III digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan pembaca tentang implementasinya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Teori ini didasarkan pada empat faktor yang berkaitan satu sama lain dan menimbulkan pertanyaan yang diajukan kepada informan berdasarkan hasil wawancara.

#### 1. Komunikasi

Mengingat komunikasi yang dilakukan oleh lembaga penegak kebijakan seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk mengiklankan wajib pajak berjalan dengan baik dalam hal penyampaian dan kejelasan informasi, namun dalam hal konsistensi dalam memberikan informasi masih kurang baik karena belum ada masih wajib pajak yang belum mengetahui pajak reklame.

#### 1. Sumber daya

##### a) Sumber Daya Manusia

Pelaku kunci dalam implementasi kebijakan adalah staf yang meluncurkan inisiatif kebijakan tertentu. Kegagalan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan rencana hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang disebabkan oleh ketidakberdayaan staf di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, ditengarai masih kurangnya profesionalisme profesional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pajak reklame di kalangan buruh harian di sana.

##### b) Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran Di Proses Implementasi Kebijakan Terhadap Kecukupan Modal, Investasi, Program Untuk Menjamin Terlaksananya Kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian mengenai anggaran di Badan Pendapatan Daerah Garut, dapat disimpulkan bahwa jumlah total anggaran selama pelaksanaan kampanye rebranding pajak telah berakhir dan tidak ada anggaran khusus. Selain itu, informasi ini sejalan dengan inisiatif pajak daerah lain yang telah dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

9  
c)

#### Sumber Daya Fasilitas.

Selain itu, fasilitas sumber daya merupakan pertimbangan penting saat menjalankan rencana. Tanpa fasilitas pendukung, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil meskipun pelaksana memiliki staf yang mampu melaksanakan apa yang perlu dilakukan dan bersedia melakukannya. Berdasarkan hasil kajian, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sudah melaksanakan pemungutan pajak reklame. Itu berasal dari pembelian fasilitas penunjang seperti kantor, komputer, dan meja makan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

4  
Sumber informasi dan kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dipegang oleh suatu organisasi yang akan mempengaruhi organisasi tersebut dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, sumber informasi dan kewenangan memungut pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sudah cukup dengan adanya lembaga semi resmi dan dengan adanya website Bapenda menyediakan berbagai jenis pajak. informasi.

### 3. Posisi

1  
Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai satu-satunya organisasi yang menyatakan keprihatinan atas sosialisasi pajak reklame tersebut, pasal ini berkaitan dengan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Garut. Karena Pemungutan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang pajak Daerah sudah ada di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, upaya rebranding pajak diharapkan berhasil memaksimalkan potensinya karena saat ini memiliki potensi yang sangat besar yang setiap tahunnya meningkat secara kuantitas.

### 4. Struktur ortodoksi

Struktur birokrasi yang bercirikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi, akan meringankan beban kerja para pelaksana kebijakan dalam menjalankan apapun tugas yang diembannya. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi setiap pelaksana untuk mengikuti agar proyek tidak menyimpang dari tujuan dan sarannya. Dua item yang dimaksud adalah prosedur standar operasional (SOP) dan fragmentasi yang tercantum di bawah ini:

#### 1) SOP, atau Standar Operasional Prosedur

26  
Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, dan terdapat standar operasional prosedur atau SOP yang harus diikuti dalam menjalankan kebijakan. Dengan adanya SOP, peserta dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dan telah mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait dengan periklanan pajak. Memudahkan petugas Bapenda dalam melaksanakan remarketing pajak.

## 2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah penerapan kebijakan tunggal yang luas kepada beberapa badan yang berbeda untuk mencapai koordinasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering digunakan di antara beberapa organisasi, sehingga secara tidak sengaja hal ini akan menyebabkan munculnya hubungan internal atau organisasi. Temuan studi menunjukkan bahwa Bidang Pendataan dan Bidang Penagihan bertanggung jawab atas struktur pelaksanaan iklan pajak. Ada koordinasi antar masing-masing bidang selama pelaksanaan pemungutan. Karena adanya beban tambahan selama pelaksanaan proyek, diharapkan proses pembuatan iklan pajak akan dikelola dan dilakukan dengan sangat efisien, dan setiap bidang akan memiliki penyebaran tanggung jawab, yang secara signifikan memperburuk pencapaian dan pelaksanaan tugas yang ada.

## 5. Simpulan dan saran

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pendataan dan analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi yang dilakukan Badan Bela Negara dengan Reklame Wajib Pajak tidak berhasil. Karena meskipun penyampaian dan penyebaran informasi berjalan dengan baik, konsistensi penyajian informasi masih belum konsisten. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa wajib pajak dengan informasi terkini tentang iklan pajak di Kabupaten Garut.
2. Sumber daya yang terhubung dengan Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Garut menjalankan kebijakan dari segi sumber daya manusia belum mencukupi sepenuhnya dari segi jumlah atau profesionalisme, sampai sumber daya fasilitas yang dimiliki sudah mencukupi, dan sumber daya anggaran sudah mencukupi tetapi masih tercampur Informasi telah ditangani dengan baik, dan sekarang ada kegembiraan.
3. Sumber daya atau sikap yang digunakan pegawai Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam keadaan baik. Organisasi niat baik pada saat pemungutan reklame tersebut disebarluaskan, Daerah sendiri memiliki satu organisasi yang melakukan pemungutan.
4. Struktur tata kelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi Garut berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Sekarang berjalan dengan sukses sesuai dengan rencana. Sama halnya seperti dilihat dari segi fragmentasi pun sudah berjalan dengan baik karena sudah terdapat penyebaran tanggung jawab pada masing-masing bidang sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan dan pelaksanaan kebijakan, baik dilihat dari target dan realisasi maupun penerimaan pajaknya.

### 5.2 Saran

Sesuai dengan kriteria berikut, saran diberikan agar:

1. Penelitian ini ditujukan sebagai proses untuk mendidik siswa di bidang pertambangan mineral di bidang perpajakan.



2. Penting untuk melakukan pendataan wajib pajak secara rutin untuk iklan, serta sosialisasi rutin dengan pajak wajib untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang perlunya membayar pajak dan memberikan tegas sebelum memberikan anggaran khusus untuk iuran pajak operasional iklan dari Kabupaten Garut.
3. Untuk pelaksanaan pemungutan pajak, sumber daya manusia harus kuat <sup>1</sup> baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, perlu menambah staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten <sup>4</sup> Garut agar proses rebranding pajak dapat dilaksanakan secara efektif.
4. Mengatasi fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang terjadi di dalam struktur Badan Pendapatan Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <sup>6</sup>  
Author. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- <sup>15</sup>  
Peraturan Daerah kabupaten Garut. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2016*.
- <sup>13</sup>  
Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta :UNISRI Press.
- <sup>8</sup>  
Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Waluyo, (2017). *Perpajakan Indonesia (edisi 12)*. Jakarta. Salemba Empat.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
3	Yunika Handayani Pantow, Herman Karamoy, Sonny Pangerapan. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2020 Publication	1%
4	<a href="http://www.ojs.uma.ac.id">www.ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
7	<a href="https://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%

8	<a href="http://journal.untar.ac.id">journal.untar.ac.id</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://lontar.ui.ac.id">lontar.ui.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.usbypkp.ac.id">repository.usbypkp.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://st293545.sitekno.com">st293545.sitekno.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://journal.iaisambas.ac.id">journal.iaisambas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://jdih.garutkab.go.id">jdih.garutkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
18	Komir Bastaman. "Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang", <i>The World of Public Administration Journal</i> , 2020 Publication	<1 %

- 
- 19 [conference.binadarma.ac.id](http://conference.binadarma.ac.id) Internet Source <1 %
- 
- 20 [hizbut-tahrir.org.my](http://hizbut-tahrir.org.my) Internet Source <1 %
- 
- 21 [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) Internet Source <1 %
- 
- 22 [pt.scribd.com](http://pt.scribd.com) Internet Source <1 %
- 
- 23 [repository.ipb.ac.id](http://repository.ipb.ac.id) Internet Source <1 %
- 
- 24 Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Wida Arindya Sari. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Tahun 2020", Eksos, 2021  
Publication <1 %
- 
- 25 Lia Taruiap Troncarelli. "Percepção das mudanças climáticas em populações de pequena escala: mapeamento sistemático da literatura e a perspectiva do povo indígena Khsêjtê", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2023  
Publication <1 %
- 
- 26 [lib.ibs.ac.id](http://lib.ibs.ac.id)

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off